



Implementasi Program Koperasi Merah Putih dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa

Rizky Juanda^{1*}, Tiara Ukhti Sabilla², Wiza Kurniawati³, Carina Fransisca⁴, Aminah Ramalia⁵

¹⁻⁵Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Jambi, Indonesia

Email: rizkyjuanda567@gmail.com¹, sabillatiara20@gmail.com², wizakurniawati@gmail.com³, carina686443@gmail.com⁴, aminahramalia@unja.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: rizkyjuanda567@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) program in promoting the economic independence of rural communities in Indonesia. Rural economic development in Indonesia continues to face various structural challenges, including limited access to capital, low quality of human resources, weak local economic institutions, and unequal economic opportunities. These conditions have hindered the optimal contribution of rural economies to national development. This research employed a qualitative approach using a literature study method combined with content analysis of policy documents, government reports, and scientific articles related to village cooperatives and community empowerment. The findings indicate that KDMP has significant potential to improve access to financing, strengthen local economic activities, encourage community participation, and support the empowerment of rural communities through cooperative-based economic systems. Nevertheless, the implementation of the program has not yet achieved optimal results due to several obstacles, such as limited managerial capacity of human resources, weak governance and accountability systems, low public participation, and the underutilization of digital technology in cooperative management. In addition, ineffective monitoring and supervision mechanisms remain major challenges in ensuring the sustainability and transparency of cooperative operations. The study concludes that the success of KDMP should not merely be measured by the number of cooperatives established, but also by the quality of management and its tangible impact on community welfare. Therefore, strengthening institutional capacity, improving human resources, enhancing governance systems, and optimizing digital technology are essential to support the sustainable development of village cooperatives and rural economic resilience.*

Keywords: *Community Empowerment; Cooperative Governance; Economic Independence; Rural Economic Development; Village Cooperatives*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa di Indonesia. Pembangunan ekonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan ekonomi lokal, serta belum meratanya kesempatan ekonomi masyarakat desa. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi ekonomi desa terhadap pembangunan nasional belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang dipadukan dengan analisis isi terhadap dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan koperasi desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDMP memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, mendorong partisipasi masyarakat, serta mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi, lemahnya tata kelola dan akuntabilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, sistem pengawasan dan monitoring yang belum efektif juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan transparansi operasional koperasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KDMP tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kualitas pengelolaan dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi teknologi digital guna mendukung pengembangan koperasi desa yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Kemandirian Ekonomi; Koperasi Desa; Pembangunan Ekonomi Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Tata Kelola Koperasi

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat. Meskipun desa memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, kontribusi ekonomi desa terhadap pembangunan nasional masih relatif tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat kemiskinan masyarakat perdesaan yang masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan pada Maret 2024 mencapai 11,79% atau sekitar 13,58 juta jiwa, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 7,09% atau sekitar 11,64 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya, penurunannya masih relatif lambat sehingga kesenjangan ekonomi desa dan kota belum sepenuhnya teratasi (Suryahadi et al., 2022).

Permasalahan ekonomi desa tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti permodalan, pasar, teknologi, dan kesempatan usaha. Keterbatasan akses tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat desa. Selain itu, lemahnya kelembagaan ekonomi lokal juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi potensi desa dalam mendorong kemandirian ekonomi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan lembaga ekonomi berbasis masyarakat yang mampu menjawab kebutuhan tersebut secara kolektif dan berkelanjutan (Mubyarto, 2004). Selain persoalan pembiayaan, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi masyarakat desa. Transformasi digital mendorong perubahan pola ekonomi dan pemasaran usaha, namun tidak seluruh pelaku usaha desa mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat perdesaan (Nugroho & Setyowati, 2023).

Dalam upaya mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat. Salah satu program yang dikembangkan adalah Koperasi Merah Putih yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan akses permodalan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat secara kolektif. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekonomi desa menuju visi Indonesia Emas 2045 (Kementerian Komunikasi Dan Digital, 2025). Secara konseptual, koperasi dipandang sebagai instrumen ekonomi yang mampu mendorong pemerataan

kesejahteraan masyarakat melalui prinsip demokrasi ekonomi dan gotong royong (Hatta, 2015).

Keberadaan koperasi di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2025, jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 127.846 unit (IndonesiaBaik.id, 2025).



Gamba 1. Jumlah Koperasi Aktif Indonesia

Namun, besarnya jumlah koperasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta tingkat partisipasi anggota yang berdampak pada rendahnya kinerja koperasi di lapangan (Ropke, 2003). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peran ideal koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dengan realitas implementasinya.

Di sisi lain, berbagai studi sebelumnya cenderung menyoroti peran koperasi secara umum dalam pembangunan ekonomi desa, namun belum secara spesifik mengkaji efektivitas implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai kebijakan baru pemerintah. Selain itu, kajian yang ada masih terbatas pada aspek normatif dan belum mengintegrasikan analisis mengenai faktor-faktor implementasi kebijakan seperti tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat secara komprehensif (Subarsono, 2019).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana implementasi program KDMP dijalankan di tingkat desa serta sejauh mana program tersebut mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program KDMP dengan menekankan pada aspek tata kelola, struktur birokrasi, serta tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) yang dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan fenomena sosial yang kompleks sehingga tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui data kuantitatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna, konteks, serta dinamika yang melatarbelakangi implementasi kebijakan, sejalan dengan pandangan (Ishtiaq, 2019) yang menekankan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman sosial dan interpretasi makna.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memilih sumber yang relevan, mutakhir, dan kredibel, seperti dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta artikel ilmiah. Literatur yang digunakan diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki keterkaitan dengan tema koperasi desa dan implementasi kebijakan, membahas aspek kelembagaan, tata kelola, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi terhadap fokus penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola tematik yang menjelaskan proses implementasi kebijakan KDMP serta tingkat keterlibatan masyarakat desa di dalamnya. Proses analisis menggunakan pendekatan analisis isi sebagaimana dikemukakan oleh Celikoglu et al. (2020), yang menekankan pada interpretasi mendalam terhadap isi pesan, struktur, dan konteks teks. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan mengelompokkan literatur yang relevan, proses pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, dan partisipasi masyarakat, serta penarikan kesimpulan melalui interpretasi hubungan antar tema. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan KDMP dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Implementasi kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi berbasis masyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi

juga sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan serta distribusi kebutuhan pokok. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Universitas Tompotika, implementasi koperasi desa memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan ekonomi, khususnya dalam aspek pembiayaan dan distribusi kebutuhan pokok (Dwi et al., 2025).

Lebih lanjut, hasil penelitian dalam jurnal J-CEKI Journal menyebutkan bahwa koperasi desa berperan dalam mendorong transformasi ekonomi pedesaan melalui peningkatan aktivitas usaha dan pemberdayaan Masyarakat (Hutagaol et al., 2026). Ini menunjukkan bahwa KDMP memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, implementasi KDMP juga menghadapi berbagai kendala. Penelitian dari STIE Bina Karya menyatakan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kemampuan manajerial menjadi hambatan utama dalam pengelolaan koperasi (Syafriзал et al., 2025). Hal ini berdampak pada kurang optimalnya kinerja koperasi di lapangan.

Selain itu, risiko dalam implementasi kebijakan koperasi juga mencakup potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana serta lemahnya sistem pengawasan (Andi et al., n.d.). Permasalahan ini menunjukkan bahwa aspek pengendalian internal dalam koperasi masih belum berjalan optimal. Lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan lembaga ekonomi berbasis masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan, implementasi KDMP berpotensi menghadapi permasalahan yang sama dengan koperasi sebelumnya.

Selain itu, salah satu analisis mengungkapkan bahwa potensi risiko dalam implementasi kebijakan koperasi meliputi penyimpangan pengelolaan dana dan lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan KDMP memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek sumber daya manusia, tata kelola, dan pengawasan (Sugiyanto, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian implementasi kebijakan KDMP memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa, namun kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi masih bersifat potensial dan belum sepenuhnya terwujud secara merata. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi KDMP tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kualitas

pelaksanaan di tingkat lokal serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Struktur Birokrasi dan Tata Kelola

Struktur birokrasi dan tata kelola merupakan elemen fundamental dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam konteks kebijakan publik, struktur birokrasi yang jelas, terkoordinasi, dan tidak berbelit menjadi prasyarat utama agar program dapat berjalan secara optimal di tingkat desa. Namun, dalam praktiknya, struktur organisasi koperasi pada tahap awal masih cenderung sederhana, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa pengurus di bidang usaha seperti pertanian dan kerajinan (Saputri et al., 2025). Kondisi tersebut seringkali disertai dengan perangkap tugas dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi organisasi, lemahnya pengambilan keputusan, serta rendahnya profesionalitas pengelolaan koperasi.

Selain itu, fokus awal yang lebih diarahkan pada pembangunan kepercayaan dan pembuktian manfaat koperasi menunjukkan bahwa orientasi kelembagaan masih berada pada tahap pembentukan legitimasi, bukan pada penguatan sistem tata kelola yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa penguatan struktur organisasi dan peningkatan kapasitas manajerial, implementasi KDMP berisiko tidak berjalan optimal dan sulit mencapai tujuan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Kondisi tersebut seringkali disertai dengan perangkap tugas dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi organisasi, lemahnya pengambilan keputusan, serta rendahnya profesionalitas pengelolaan koperasi. Selain itu, fokus awal yang lebih diarahkan pada pembangunan kepercayaan dan pembuktian manfaat koperasi menunjukkan bahwa orientasi kelembagaan masih berada pada tahap pembentukan legitimasi, bukan pada penguatan sistem tata kelola yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa penguatan struktur organisasi dan peningkatan kapasitas manajerial, koperasi berisiko mengalami stagnasi dan sulit berkembang secara optimal dalam jangka panjang.

Dalam aspek tata kelola, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Koperasi Merah Putih diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha bersama, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal, sehingga produk desa tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi (Okfitasari, 2025). Namun demikian, pencapaian tersebut sangat bergantung pada adanya sistem pengelolaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa

akuntabilitas yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi cenderung menurun, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi anggota dan terhambatnya perkembangan koperasi secara berkelanjutan.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola koperasi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan, proses pengambilan keputusan, serta penyampaian informasi kepada anggota terbukti mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam koperasi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tingkat transparansi yang tinggi berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan anggota terhadap koperasi (Turi & Muharram, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan transparansi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sistem pencatatan, rendahnya literasi keuangan pengelola, serta belum optimalnya mekanisme penyampaian informasi kepada anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun legitimasi dan keberlanjutan koperasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi pondasi penting agar koperasi desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing. Indikator tata kelola tersebut mencakup partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Partisipasi publik terlihat dari keterlibatan warga desa dalam perencanaan dan pengelolaan koperasi sehingga dapat menciptakan rasa memiliki serta memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal. Transparansi diwujudkan melalui pelaksanaan mekanisme audit keuangan secara berkala dan penyusunan laporan yang terbuka guna membangun kepercayaan publik. Akuntabilitas memerlukan kepastian hukum serta pengawasan dari pemerintah daerah agar setiap aktivitas koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan legal. Selain itu, efektivitas menjadi aspek penting karena model koperasi yang diterapkan harus sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat agar program dapat berjalan secara efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Secara keseluruhan, penguatan struktur birokrasi dan tata kelola dalam implementasi KDMP perlu difokuskan pada peningkatan koordinasi antar lembaga, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan sistem pengawasan. Dengan demikian, koperasi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang Implementasi Koperasi Desa Merah Putih KDMP

Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pendirian koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, program ini diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat, mulai dari pengelolaan hasil pertanian, distribusi barang, hingga penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks ini, koperasi memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, memperpendek rantai pasok, menekan peran tengkulak, serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil melalui penguatan kemandirian ekonomi desa. Namun demikian, potensi tersebut tidak serta-merta dapat terwujud secara otomatis, karena sangat bergantung pada kualitas pengelolaan koperasi, tingkat partisipasi masyarakat, serta kemampuan kelembagaan dalam mengelola sumber daya yang ada. Tanpa dukungan aspek tersebut, koperasi berisiko hanya menjadi instrumen administratif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa.

Namun demikian, implementasi koperasi ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen koperasi serta literasi keuangan menjadi hambatan utama yang berdampak langsung pada lemahnya perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan (Setyorini, 2016). Banyak koperasi di masa lalu mengalami kegagalan akibat pengelolaan yang tidak profesional, minimnya pelibatan masyarakat, serta tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, sehingga menghambat terbentuknya kemandirian kelembagaan.

Selain itu, koperasi juga menghadapi tantangan kelembagaan yang cukup kompleks, seperti minimnya transparansi dalam pengelolaan, potensi politisasi, serta lemahnya penerapan prinsip-prinsip dasar koperasi. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, karena berkaitan dengan belum optimalnya sistem tata kelola dan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya dikelola secara profesional dan masih cenderung belum berorientasi pada kepentingan anggota sebagai pemilik utama, sehingga berpotensi menghambat keberlanjutan dan efektivitas perannya dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

Di sisi lain, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pencatatan, layanan, dan pemasaran juga membatasi efektivitas koperasi dalam menjawab tuntutan ekonomi modern. Banyak koperasi yang masih menggunakan sistem manual, sehingga proses administrasi menjadi kurang efisien, rentan terhadap kesalahan, serta menyulitkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Kondisi ini turut berdampak pada rendahnya

daya saing koperasi dalam mengakses pasar yang lebih luas, khususnya dalam ekosistem ekonomi digital.

Jika ditinjau secara lebih kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh pembentukannya secara administratif, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, tata kelola kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, koperasi berpotensi hanya menjadi program formal yang bersifat simbolik, tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kemandirian ekonomi desa (Arzewiniga, 2025).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendorong penguatan ekonomi desa, terutama dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena masih adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.

Permasalahan utama tidak terletak pada konsep koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan, melainkan pada aspek implementasi yang mencakup kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Kelemahan pada aspek-aspek tersebut menyebabkan koperasi belum mampu berfungsi secara profesional dan berkelanjutan, sehingga kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi desa masih bersifat potensial dan belum sepenuhnya aktual.

Selain itu, pendekatan kebijakan yang cenderung berorientasi pada pembentukan koperasi secara administratif berisiko mengabaikan aspek kualitas pengelolaan dan kesiapan kelembagaan. Kondisi ini dapat menyebabkan koperasi hanya berfungsi sebagai formalitas program tanpa memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan KDMP seharusnya tidak diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari sejauh mana koperasi tersebut mampu beroperasi secara efektif, mandiri, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, lemahnya sistem tata kelola, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia semakin memperkuat indikasi bahwa tantangan implementasi KDMP bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan administratif semata. Tanpa adanya transformasi dalam aspek-aspek tersebut, koperasi akan sulit beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern dan berpotensi tertinggal dalam persaingan pasar.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak dapat diukur semata dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas pengelolaan dan dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat desa. Tanpa penguatan pada aspek sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi digital, koperasi Merah Putih berpotensi hanya menjadi simbol kebijakan yang tidak mampu mendorong perubahan ekonomi yang substansial. Oleh karena itu, transformasi kelembagaan koperasi menjadi organisasi yang profesional, adaptif, dan berbasis partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memiliki potensi strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan aktivitas ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat berbasis kolektif. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena masih adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Permasalahan utama terletak pada aspek implementatif, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan sistem pengawasan turut memperkuat hambatan dalam meningkatkan efektivitas koperasi. Kondisi ini menyebabkan koperasi belum mampu berfungsi secara profesional dan berkelanjutan, sehingga kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi desa masih bersifat potensial. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi KDMP tidak dapat diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan dari kualitas pengelolaan, efektivitas kelembagaan, serta dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat desa. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendorong koperasi agar mampu berperan sebagai instrumen ekonomi yang produktif dan berkelanjutan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

DAFTAR REFERENSI

- Agustian Hutagaol, I., Iswati, S., & Suwarno, P. (2026). Transformasi ekonomi pedesaan melalui koperasi desa merah putih: Kontribusi terhadap ketahanan ekonomi dan pertahanan negara Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2).
- Andi, R., Hendry, W., & Noor, J. (n.d.). *Kebijakan koperasi desa merah putih: Risiko hukum dan pencegahannya*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*.

- Celikoglu, O. M., Krippendorff, K., & Ogut, S. T. (2020). Inviting ethnographic conversations to inspire design: Towards a design research method. *The Design Journal*, 23(1), 133–152. <https://doi.org/10.1080/14606925.2019.1693209>
- Dwi, F., Noho, S., Pemerintahan, I., & Negara, I. A. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan koperasi desa merah putih dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Retrieved May 2, 2026, from <https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/fisip>
- Febianriza Arzewiniga, Z. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan koperasi desa merah putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2).
- Hatta, M. (2015). *Membangun koperasi dan koperasi membangun*. Kompas.
- Ishtiaq, M. (2019). Book review Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Jadi akar perekonomian, ada berapa koperasi di Indonesia? (n.d.). Retrieved May 2, 2026, from <https://indonesiabaik.id/infografis/jadi-akar-perekonomian-ada-berapa-koperasi-di-indonesia>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (n.d.). Retrieved May 2, 2026, from <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/imdi-2025-naik-ke-4453-indonesia-makin-cakap-digital>
- Mubyarto. (2004). *Ekonomi kerakyatan*. LP3ES.
- Nugroho, A., & Setyowati, R. (2023). Transformasi digital dan tantangan ekonomi masyarakat desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1), 55–67.
- Okfitasari, S. A. (2025). Akuntabilitas keuangan koperasi di Indonesia dengan Permenkop Nomor 2 Tahun 2024. *Edunomika*, 9(2).
- Ropke, J. (2003). *Ekonomi koperasi: Teori dan manajemen* (S. Djatnika, Trans.). Salemba Empat.
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi desa merah putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Setyorini, W. (2016). Peran sumber daya manusia koperasi dalam aspek penilaian manajemen penilaian kesehatan koperasi. *Economic Education Analysis Journal*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj>
- Subarsono. (2019). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyanto. (2025). *Tata kelola koperasi dengan pendekatan stewardship atau agency theory*. <https://doi.org/10.32670/jc.v1i2.22>
- Syafrizal, R., Aulia, C., Hasyim, L. W., Tinggi, S., Ekonomi Bina Karya, I., Islam, A., Deli, T. T., Haji, U., & Utara, S. (2025). Analisis peluang dan tantangan koperasi desa merah putih dalam pemberdayaan ekonomi desa. 4(2), 80–85. Retrieved May 2, 2026, from <http://www.journal.stie-binakarya.ac.id>
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. *Jurnal Economina*, 2(12), 3787–3797. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>